



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 5, Tahun 2024, pp 1159-1164  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Penguatan Perilaku Rasional Politik Birokrasi (ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Kabila Dan Kecamatan Bulango Timur**

**Ramli Mahmud<sup>1\*</sup>, Zulfikar Adjie<sup>2</sup>, Asmun Wantu<sup>2</sup>, Rasid Yunus<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Gorontalo  
Email: Ramlimahmud33@ung.ac.id

### **Abstrak**

Kecenderungan tidak netralnya birokrasi dalam Pemilu karena diakibatkan dari pola perilaku politik birokrasi. Perilaku politik birokrasi dalam pendekatan sosiologis dan identifikasi partai pembuat birokrasi terpola pada segmentasi kelompok agama, suku, partai politik dan lain sebagainya. Kenetralan birokrasi dapat tercapai jika preferensi politik birokrasi (ASN, Kepala Desa, Aparat Desa) berdasarkan pada perilaku politik yang rasional. Pengabdian ini bertujuan 1) Identifikasi masalah kerawanan pelanggaran Pemilu yang terjadi disekitar lingkungan Birokrasi, 2) Membangun kesadaran birokrasi untuk tetap berikhtiar atas jenis pelanggaran Pemilu. 3) Memberikan penguatan atas penerapan nilai perilaku politik rasional dalam mendukung netralitas birokrasi dalam Pemilu. 4) sebagai sarana pendidikan politik untuk penguatan preferensi politik birokrasi menjadi pemilih cerdas dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada Pemilu serentak tahun 2024. Melalui pengabdian ini, birokrasi dapat aktif secara massif dalam melakukan pengawasan partisipatif menjelang Pemilu serentak tahun 2024.

**Kata Kunci:** *Perilaku, Rasional, Netralitas, Birokrasi, Pemilu*

### **Abstract**

The tendency for the bureaucracy to not be neutral in the election arena is caused by the bureaucracy's political behavior patterns. Political behavior in sociological and party approaches makes these policies patterned at segmentation of religious groups, ethnicities, political parties and so on. Bureaucratic neutrality can be achieved if the political preferences of the bureaucracy (ASN, Village Head, Village Apparatus) are influenced by rational political behavior. This service aims to 1) Identify problems of vulnerability to election violations that occur around the environmental bureaucracy, 2) Build awareness of the bureaucracy to continue working to overcome types of election violations. 3) Provide enforcement of rational political behavior values in supporting bureaucratic neutrality in elections. 4) As a means of political education to strengthen the preferences of the political bureaucracy so that they become intelligent voters and actively participate in supervising the 2024 simultaneous elections. Through this service, the bureaucracy can play a massive active role in carrying out participatory supervision ahead of the 2024 simultaneous elections.

**Keywords:** *Behavior, Rational, Neutrality, Bureaucracy, Elections.*

## PENDAHULUAN

Momentum Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah selalu mengisahkan masalah yang hingga kini belum dapat teratasi adalah masalah netralitas Birokrasi yang tidak independen serta cenderung mendukung pasangan calon tertentu. Data laporan KASN 2017, 2018, 2019 dan 2020 tercatat sekitar 2.347 kasus menyangkut dengan keberpihakan birokrasi dalam Pemilu. Catatan Kompas 16 Maret 2021 dan Bpost 16 Desember 2021 mengisyaratkan bahwa perilaku ketidaknetralan birokrasi menjelang Pemilu 2024 akan semakin kompleks bila dibanding dengan Pemilu sebelumnya. Selain itu, data survey KASN 2021 Menyebutkan bahwa penyebab ketidaknetralan birokrasi terdiri dari ikatan persaudaraan 50,76 % serta motif karir 49,72%, selain itu sekitar 62,7% disebabkan oleh posisi kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kondisi seperti ini berakibat pada perilaku politik ASN yang tidak konsisten atas ideal rasionalnya birokrasi untuk bebas dalam politik praktis. Kondisi tersebut menjadi keresahan bagi ASN dalam kontestasi politik lokal. Keresahan tersebut berpengaruh terhadap preferensi politik birokrasi di daerah, sekitar 51,16 % Aspirasi ASN agar hak politiknya dicabut sebagai pemilih. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Bawaslu RI tentang potensi kerawanan Pilkada serentak 2024 diantaranya adalah mobilisasi birokrasi. Konteks tipe ideal rasional tersirat dengan jelas melalui regulasi dan tata aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam pasal 29 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang melarang dengan tegas kepala desa terlibat dalam politik praktis

Diantara ketiga regulasi tersebut telah dinyatakan dengan tegas bahwa Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa beserta Perangkatnya dilarang keras melakukan politik praktis atau terlibat dengan hal-hal yang berhubungan dengan politik. Namun tidak selamanya regulasi tersebut dapat membatasi ruang gerak birokrasi dalam setiap agenda demokrasi, masih terdapat sebagian birokrasi terlibat langsung dengan agenda demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Realitanya banyak pelanggaran oknum birokrat khususnya berkaitan dengan netralitas. Tidak netralnya birokrasi karena paksaan dari atasan, ekspektasi jabatan dari politisi atau partai yang didukung maupun ikatan emosional oknum birokrat terhadap partai atau politisi serta kelompok birokrasi sebagai target potensial yang selalu dimanfaatkan oleh partai maupun politisi. (Firnias, 2016)

Problem reformasi birokrasi sangatlah kompleks, berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk menata birokrasi, namun disisi lain terdapat ragam masalah menyelimuti birokrasi era-sekarang terutama menyangkut dengan independensi/netralitas serta perilaku birokrasi ketika diperhadapkan dengan agenda demokrasi melalui Pemilu. Apa yang dikemukakan oleh Beetham (1975) dalam (Thoha, 2014) tentang tiga elemen pokok konsep ideal Weber, diantaranya birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis, kekuatan independen dalam masyarakat dan birokrasi tidak mampu memisahkan perilaku kepentingan mereka dengan kelompok masyarakat yang menyebabkan birokrasi kehilangan fungsi.

Data kuantitatif tersebut di atas juga searah dengan berbagai temuan tentang netralitas ASN dalam Pemilu maupun Pilkada diantaranya (Mahmud, et al., 2022) mengemukakan bahwa perilaku birokrasi dalam Pemilu cenderung dalam pendekatan perilaku sosiologis dan identifikasi partai, faktor kepala daerah menjadi pertimbangan utama ASN dan perangkat desa dalam mendukung calon tertentu. Temuan Jahan (2006) dalam (Sarker, Sultana, & Prophan, 2017) mensinyalir bahwa politisasi birokrasi bukan hanya terjadi pada tataran eksekutif namun terjadi dalam struktur birokrasi yang berada dalam jajaran eksekutif seperti kepolisian. Hal yang sama dikemukakan oleh (Gehlbach & Simpser, 2015) bahwa perilaku kepatuhan birokrasi seringkali penting untuk kelangsungan hidup politik, namun memunculkan kepatuhan dalam lingkungan yang dilembagakan secara lemah mengharuskan pelaku politik meyakinkan agen bahwa kekuasaan mereka pada kekuasaan aman, dengan memanipulasi kekuasaan dapat mendorong seorang birokrat untuk bekerja atas nama

penguasa. Hal menarik lainnya adalah temuan (Adi, Nurdin N, Saiyasopon, Mohamed, & Fathoni, 2021) mensinyalir bahwa dalam setiap periodisasi Pemilu, birokrasi selalu dikultuskan dengan ketidaknetralannya hingga saat ini belum dapat terselesaikan Atas dasar inilah (Porter & Rogowski, 2018) mengemukakan bahwa bias atas partisan yang tidak netral dalam pemilu harus dicermati lebih lanjut untuk melihat mengapa kelompok partisan ASN berpihak kepada calon dan partai tertentu dalam setiap Pemilu.

Hasil penelitian (Mahmud, et al., 2021) menunjukkan bahwa Sebagian besar ASN di jajaran struktural dan fungsional khususnya guru menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, Diantara pertimbangan yang dimaksud antara lain, pekerjaan sebagai ASN, Kepatuhan terhadap kepala daerah, kekeluargaan dan afiliasi ASN dengan organisasi kemasyarakatan.hal yang sama dikemukakan oleh (Wahyudi, 2018) menyimpulkan bahwa perilaku ketidaknetralan birokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak pra kemerdekaan hingga decade sekarang ini. Temuan tersebut tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh (Siti, 2021) bahwa birokrasi Indonesia masih rentan terhadap intruksi politik kekuasaan untuk melanggengkan status quo dalam Pemilu maupun Pilkada. Menonjolnya keterlibatan birokrasi seiring dengan keikutsertaan petahana dalam pemilihan umum nasional dan daerah. ASN mengalami disorientasi dan budaya birokrasi yang masih mempertahankan nilai lama membuat birokrasi tidak efektif dalam mempertahankan profesionalisme dan kenetralan dalam Pemilu. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka, terdapat beberapa ulasan mendasar tentang dukungan potensi pelaksanaan pengabdian ini antara lain; Pelaksanaan pengabdian ini didukung oleh berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga netralitas selama Pemilu. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan dukungan yang kuat terhadap kegiatan pengaturan preferensi politik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan perangkatnya, memastikan bahwa mereka tetap netral dalam proses pemilihan. Selain itu, ASN, Kepala Desa, dan Camat juga menunjukkan dukungan aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini, sehingga menciptakan sinergi yang positif. Tak kalah penting, semua pemangku kepentingan, termasuk KPU dan Bawaslu, memiliki keinginan yang sama untuk mendorong netralitas ASN, Kepala Desa, dan perangkatnya di Provinsi Gorontalo, yang menunjukkan komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan transparan

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mengadopsi metode yang terdiri dari beberapa tahapan penting untuk memastikan keberhasilan program. Tahapan pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan pemerintah kecamatan, serta penyediaan sarana seperti spanduk dan materi untuk penyuluhan atau sosialisasi. Selanjutnya, kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan aparatur birokrasi, termasuk ASN, Kepala Desa, dan perangkat desa, di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bulango Timur. Materi yang disampaikan mencakup penguatan perilaku rasional politik birokrasi dan regulasi teknis terkait netralitas ASN, dengan narasumber yang berkompeten. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para birokrat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta memperkuat interaksi mereka dengan masyarakat. Selain itu, program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan melalui kolaborasi dengan Bawaslu dan pemerintah kecamatan dalam melakukan pendampingan secara berkala, mendorong penggunaan media sebagai sarana pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024, sehingga menciptakan lingkungan politik yang lebih baik di Kabupaten Bone Bolango

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penguatan Perilaku Rasional Politik Birokrasi dalam Pemilu**

Sejatinya aparatur birokrasi harusnya netral dalam Pemilu, akan tetapi pada kenyataannya aparatur birokrasi selalu dijadikan sebagai mesin pendulang suara di setiap hajatan Pemilu. Oleh sebab itu, pendekatan melalui berbagai perspektif perlu dilakukan agar permasalahan birokrasi dalam Pemilu dapat teratasi. Data (Kompas, 2021) dan laporan dan (KASN, 2024) menunjukkan terdapat 2.341 pelanggaran ASN dan aparatur desa sejak Pemilu 2017-2024. Temuan tersebut merupakan

bagian dari data kuantitatif yang tidak dapat dibantah, namun demikian jika dilihat secara detail dalam prakteknya, data kualitatif menunjukkan bahwa hampir Sebagian besar aparatur birokrasi cenderung tidak netral. Atas hal tersebut, perlu adanya penguatan pada aspek perilaku politik rasional birokrasi agar ASN maupun perangkat desa dapat mengedepankan perilaku rasionalnya dalam Pemilu. Efektifnya pelaksanaan pengabdian tersebut juga sangat tergantung dengan ketepatan metode untuk mendiagnosa permasalahan melalui metode sosialisasi dan penyebaran angket melalui google form yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Hal ini dilakukan agar muatan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh peserta pengabdian. Hasil temuan data menunjukkan bahwa sebagian besar preferensi politik peserta lebih condong pada perilaku sosiologis dan psikologis/ identifikasi partai. Diantaranya, preferensi sosiologis berdasarkan pertimbangan ketokohan, agama, kekerabatan, Bahasa dan lain sebagai sebanyak 73 %. Sementara itu perilaku psikologis dengan pertimbangan partai politik 19 % dan rasional dengan pertimbangan kebutuhan dan keuntungan sebanyak 8 %. Kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa kecenderungan aparatur birokrasi sulit untuk dicapai jika perilaku politik birokrasi lebih cenderung pada pendekatan sosiologis dan psikologis.



Gambar 1. Sesi Perkenalaan Peserta Pengabdian

Kondisi yang terjadi di kecamatan Kabila maupun Bulango Utara tersebut juga sesuai dengan temuan (Mahmud, et al., 2021) dan bahwa secara umum perilaku aparatur birokrasi baik aparatur birokrasi yang berada dalam jajaran fungsional dan struktural lebih mengedepankan pendekatan sosiologis sehingga membuat birokrasi cenderung tidak netral. Begitupun sebaliknya temuan (Mahmud, et al., 2022) mengemukakan bahwa terdapat kecenderungan aparatur birokrasi di jajaran fungsional Kesehatan lebih rasional dan cenderung netral dalam Pemilu 2019 bila dibandingkan dengan aparatur birokrasi yang berada dalam jajaran struktural dan fungsional guru cenderung tidak netral karena lebih mengedepankan pertimbangan atau pendekatan sosiologis dan psikologis. Penguatan Perilaku Rasional Politik Birokrasi dalam Konteks Sosiologis dan Psikologis

Materi sosialisasi dalam kegiatan pengabdian lebih fokus pada pendekatan rasional bila dibandingkan dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Terdapat berbagai respon berbagai dari peserta dalam agenda diskusi, namun pada prinsipnya peserta merasakan bahwa informasi dengan tema penguatan perilaku rasional aparatur birokrasi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta dalam mengedepankan perilaku rasional memberikan pilihan politik pada Pemilu 2024. Peserta juga menyadari bahwa sikap selama dalam Pemilu selalu didikte oleh atasan dan lain sebagainya. Melalui materi yang telah disajikan dapat memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi atas keberadaannya sebagai abdi negara untuk netral dalam pemilu dan bersikap rasional dalam arena Pemilu.



Selain itu, materi teknis Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tentang pelanggaran ASN dan aparat desa dalam Pemilu juga dapat memberikan penguatan kepada peserta tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan larangan aktifitas ASN dan aparat desa dalam Pemilu serentak. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa terkait kebijakan program pelayanan dasar kepada warga Masyarakat. Hampir sebagian besar kepala desa merasa bingung dengan apa yang mereka hadapi. Disatu sisi terdapat larangan aktifitas kepala desa dalam kegiatan yang menguntungkan pasangan calon, dilain sisi kepala desa juga harus menjalankan kebijakan bupati. Untuk mensinkronisasi masalah tersebut, penguatan terhadap perilaku rasional politik dapat membantu para kepala desa dalam menelaah dan mengeksekusi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat tanpa merugikan salah satu pasangan calon. Kegiatan pengabdian berjalan efektif sesuai dengan skema yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan Jutrusan IHK Prodi PPKn FIS UNG. Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan manfaat pelaksanaan pengabdian. Salah satu indikatornya adalah hasil sebaran kuesioner yang diedarkan setelah pelaksanaan kegiatan melalui google form seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Hasil Preferensi Perilaku Politik Aparatur Birokrasi

Hasil olahan data setelah pelaksanaan pengabdian menunjukkan bahwa terdapat penguatan preferensi perilaku politik bagi aparatur birokrasi. Selain itu, terdapat 78 % perilaku rasional politik yang terdiri dari aspek pertimbangan kebutuhan 30 % dan visi misi sebanyak 48 %. Hal ini berbeda dengan temuan data sebelum pelaksanaan pengabdian dimana sekitar 8 % peserta cenderung rasional. Begitu juga sebaliknya, 73 % perilaku sosiologis sebelum kegiatan dan setelah kegiatan menjadi 17 % yang terdiri dari aspek pertimbangan ketokohan 10 % dan kekerabatan 7 % serta masih terdapat 5 % peserta cenderung mendukung dan memilih pasangan calon karena pertimbangan psikologis atau partai politik.

## SIMPULAN

Penguatan Perilaku Rasional Politik dapat dijadikan sebagai alternatif bagi aparatur birokrasi untuk menjaga netralitasnya pada saat Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdapat capaian atas tujuan dan manfaat pengabdian. Preferensi politik aparatur birokrasi dalam pendekatan perilaku sosiologis dari aspek ketokohan dan kekerabatan serta perilaku psikologis dengan pertimbangan partai politik cenderung membuat aparatur birokrasi tidak netral dalam Pemilu. Sikap dan perilaku politik

dengan mengedepankan ketokohan, kekerabatan serta partai politik akan mempengaruhi dukungan dan Keputusan politik untuk memilih pasangan calon. Akibatnya akan terjadi polarisasi dukungan dan aparatur birokrasi akan berpihak dalam mendukung maupun memobilisasi pemilih dalam Pemilu. Kecenderungan netralitas aparatur birokrasi dalam Pemilu dapat terjadi jika perilaku rasional politik menjadi acuan dalam. Pemilu. Hitungan untung dan rugi dalam memberikan hak politik berdasarkan kebutuhan dan visi-misi pasangan calon akan mampu mendorong aparatur birokrasi untuk keluar dari tekanan politik serta mandiri dalam pilihan politik tanpa intervensi.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango beserta staf dan jajaran, LP2M Universitas Negeri Gorontalo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Pemerintah Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bulango Timur atas dukungan dalam pelaksanaan Pengabdian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bidja, I., 2022. Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), pp. 2034-2041.
- Edward, A. & Ward, B., 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: YOI.
- Gehlbach, S. & Simpser, A., 2015. Electoral Manipulation as Bureaucratic Control. *American Journal of Political Science*, pp. 212-224.
- Jeong, G. H., 2016. Electoral Rules and Bureaucratic Effectiveness. *P&P: Politics & Policy*, pp. 1089-1115.
- Kompas, 2021. *Problem Netralitas Bisa Lebih Berat*. Jakarta, Kompas.
- Mahmud, R., Wantu, A., Yunus, R. & Adhani, Y., 2022. Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Porter, E. & Rogowski, J. C., 2018. Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, pp. 602-617.
- Sarker, M., Sultana, Y. & Prodhan, A., 2017. Problems and Challenges of Public Administration in Bangladesh: Pathway to Sustainable Development. *international Journal of Public Administration and Policy Research*, pp. 16-25.
- Singh, R., 2019. Coalition Politics in Contemporary India: Development and Dimensions. *Jurnal Studi Pemerintahan*, pp. 19-30.
- Siti, Z. R., 2021. The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics. *Journal of Business and Entrepreneurship*, pp. 63-76.
- Wahyudi, L., 2018. Politisasi Birokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Paradigma*, pp. 155-164.